

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Jepang dan Korea Selatan merupakan negara yang memiliki kedekatan baik secara geografis maupun nilai budaya. Meskipun begitu, dengan berbagai persamaan yang dimiliki, hubungan bilateral keduanya menghadapi berbagai tantangan berupa konflik terkait dengan isu sensitif yang berakar pada sejarah okupasi Jepang di semenanjung Korea. Kekejaman Jepang terhadap korban “*comfort women*” meninggalkan trauma pada rakyat Korea Selatan, yang kemudian memunculkan adanya sentimen atau persepsi negatif terhadap Jepang.

Trauma merupakan pengalaman yang amat menyakitkan, dapat berupa penghinaan atau pengkhianatan yang kemudian sulit untuk dilupakan. Pada masa penjajahan Jepang, militer Jepang menciptakan sistem “*comfort women*” yang menjadikan wanita-wanita Korea sebagai budak seks bagi militer Jepang, yang tersebar di berbagai daerah jajahan Jepang di Asia. Wanita-wanita tersebut direkrut dengan cara diculik bahkan ditipu, dan diperlakukan secara tidak manusiawi selama berada di “*comfort station*”. Penderitaan para wanita tersebut bahkan tidak lantas berakhir ketika Perang Dunia II berakhir, dan Jepang meninggalkan Korea.

Trauma akan perlakuan Jepang terhadap korban “*comfort women*” yang memperlakukan dan merendahkan martabat bangsa Korea, kemudian menimbulkan adanya sentimen anti Jepang pada masyarakat Korea Selatan yang

tercermin pada opini publik Korea Selatan. Persepsi negatif ini terus meluas dan diturunkan kepada generasi selanjutnya di Korea Selatan, dan semakin diperburuk dengan adanya perilaku dan pernyataan-pernyataan pemerintah Jepang terkait “*comfort women*” yang kerap kali memprovokasi masyarakat Korea Selatan.

Dalam memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban paska trauma, pengakuan, penghormatan dan permintaan maaf adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Akan tetapi, pemerintah Jepang memerlukan waktu yang sangat lama untuk akhirnya benar-benar mengakui, meminta maaf, dan bertanggung jawab kepada korban “*comfort women*” di Korea Selatan, sehingga konflik “*comfort women*” antara Jepang dan Korea Selatan kerap kali memanasi, sehingga menghambat hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan.

Di tahun 2012, Jepang dan Korea Selatan sempat menginisiasi kerjasama keamanan bilateral antar kedua negara untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II berakhir. Akan tetapi, kerjasama ini terpaksa harus dibatalkan dengan adanya penolakan publik Korea Selatan dengan adanya sentimen anti Jepang yang tinggi terkait isu “*comfort women*”. Menurut Thomas Risse dalam *public opinion, domestic structure, and foreign policy in liberal democracies* opini publik dapat mempengaruhi kebijakan negara dengan derajat yang berbeda-beda. Semakin homogen masyarakat sebuah negara, dan semakin demokratis negara tersebut, maka semakin besar pengaruh opini publik terhadap kebijakan yang dibuat oleh negara. Korea Selatan dibangun dari masyarakatnya yang homogen dan memiliki rasa saling memiliki atau *sense of belonging* yang tinggi. Oleh karena itu, rasa nasionalisme dan saling memiliki yang berdasar pada sentimen anti-Jepang lebih

mudah meluas pada masyarakatnya. Penolakan publik Korea Selatan kemudian secara langsung mempengaruhi batalnya kerjasama keamanan antara Jepang dan Korea Selatan. Terlepas dari adanya berbagai ancaman yang dilancarkan Korea Utara sebelumnya, kerjasama keamanan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan pun tidak pernah terealisasi hingga akhir tahun 2016.

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik "*comfort women*" menghambat terbentuknya kerjasama keamanan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan. kemudian, kerjasama keamanan bilateral kedua negara terbentuk setelah membaiknya hubungan bilateral negara paska penyelesaian konflik "*comfort women*".

#### **4.2. Saran**

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, misalnya penelitian ini lebih fokus kepada pengaruh isu "*comfort women*" terhadap kerjasama keamanan bilateral Jepang dan Korea Selatan. Oleh karena itu pada penelitian berikutnya dengan topik yang sama, disarankan untuk menjelaskan pengaruh isu sejarah terhadap hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan di bidang lainnya.

Sesuai dengan permasalahan penelitian ini, yang dapat diusulkan adalah, selain pengakuan formal dan permintaan maaf yang telah dinyatakan pemerintah Jepang, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah Jepang, seperti merevisi informasi atau buku-buku sejarah yang mendistorsi fakta keterlibatan militer Jepang dalam terbentuknya sistem "*comfort women*", perlu pula adanya konsistensi baik dari pemerintah Jepang dan Korea Selatan dalam menjalankan

poin-poin yang telah disepakati kedua belah pihak dalam penyelesaian konflik isu “*comfort women*”. Hal ini terutama perlu ditekankan kembali saat adanya pergantian pemerintahan, untuk menghindari isu “*comfort women*” kembali memanas dan menghambat kerjasama antar kedua negara, selain itu perlu adanya edukasi bagi generasi muda baik di Jepang dan Korea Selatan bahwa isu “*comfort women*” merupakan bagian dari sejarah Jepang dan Korea Selatan, akan tetapi kedua negara telah berhasil mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dan siap untuk membangun kerjasama kedua negara ke arah yang lebih baik.